Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2025

No	Judul Produk Hukum	Tanggal Penetapan	Hasil Evaluasi dan Rekomendasi
1	Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Cara Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi Pejabat Dnas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	29 September 2025	**Isu dalam pelaksanaan:** 1. Relevansi penggunaan istilah PDLN dengan kondisi saat ini; 2. Penyesuaian pemberian pinjaman untuk sewa rumah pasca diundangkannya Permenlu mengenai FSR; (Permenlu FSR telah mencabut ketentuan pinjaman sewa rumah) 3. Kekosongan hukum untuk pengaturan bahwa pinjaman yang sudah diajukan dan dicairkan tidak dapat dikembalikan. **Rekomendasi:** 1. Setelah diterbitkannya Kepmenlu 10/B/KU/08/2024/01 Tahun 2024 tentang juklak Pinjaman Resmi, teknis pelaksanaan sudah berjalan lancar 2. Penyesuaian nomenklatur PDLN akan dilakukan sesuai kebijakan kemlu 3. Perlu koordinasi dengan Pustik KP mengenai pembubuhan materai dalam surat-surat terkait pinjaman resmi 4. Rekomendasi Permenlu 7/2022: untuk saat ini permenlu masih bisa dipertahankan karena masih relevan. Kecuali jika sudah ada kebijakan baru mengenai term PDLN, perlu disesuaikan. 5. Usul perubahan di Permenlu 2/2021: mengubah kata “persekot” menjadi “pinjaman resmi”

Analisis dan Evaluasi